



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PASURUAN
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TITRIT SATRIJA NIMPUNA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 744687

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 430.720.000

1. Tanah Seluas 384 m2 di PASURUAN, LAINNYA Rp. 30.720.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/70 m2 di KOTA PASURUAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.000.000

1. MOTOR, SUZUKI UY125 S AT / SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun
2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 12.000.000
4. MOBIL, SUZUKI ARK415F GL (4X2) A/T Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 152.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.637.901.794

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.246.621.794

III. HUTANG Rp. ----

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.246.621.794

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.